

PROPOSAL

**KAJIAN PEMETAAN SOSIAL EKONOMI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA LABUHAN LALAR KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

diusulkan kepada

**SOCIAL RESPONSIBILITY (SR)
PT PLN (PERSERO) WILAYAH NTB
SEKTOR TAMBORA**

oleh

**LEMBAGA RISET, PUBLIKASI DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT (LRP2M)
UNIVERSITAS CORDOVA
2019**

Alamat Kantor :

Jl. Pondok Pesantren No 112 Taliwang-KSB
Hp: 081915849785/085339902221
Email: lrp2mundova@gmail.com¹

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka untuk mempercepat implementasi program diversifikasi energi pada pembangkit tenaga listrik dan bahan bakar minyak ke bahan bakar non-minyak, dan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga listrik, diperlukan upaya untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar batu bara, maka Pemerintah menugaskan PT.PLN (Persero) selaku pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2006.

Pembangunan PLTU Sumbawa Barat 2x7 MW merupakan bagian dari program percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan, batu bara dan gas (Perpres no.4 tahun 2010) yang akan menyuplai kebutuhan listrik di Indonesia. Letter of Intent ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2011 dan Kontrak No. 320.PJ/041/DIR/2011 antara PT. PLN (Persero) dengan Konsorsium PT. Twink Indonesia – PT. Perfec Circle Engineering telah ditandatangani pada tanggal 8 Juli 2011.

PLTU Sumbawa Barat terletak di Jalan Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat – NTB, berada pada koordinat: 8° 44' 59" BT dan 116° 46' 58,27" BT. PLTU Sumbawa terdiri dari 2 Unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing 7 MW menggunakan batu bara kalori rendah ± 3800 kcal/kg. Boiler yang digunakan menggunakan boiler tipe Stocker dengan kapasitas steam output 40 t/h, tekanan kerja 5.3 Mpa dan temperatur 485° C. Konsumsi batu bara ± 18 ton/jam untuk 2 unit boiler pada saat beban maksimum.

Energi listrik yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di sistem Sumbawa. Listrik keluaran disalurkan melalui Jaringan Transmisi SUTT70 kV dari Switchyard di pembangkit Gardu Induk Kertasari ke pusat beban di Gardu Induk Taliwang. Keseluruhan untuk pengelolaan operasi & pemeliharaan PLTU di bawah kendali PLN Unit Pelaksana Pembangkit (UPK) Tambora. Dalam kegiatan operasional PLTU Sumbawa berkomitmen menjadi pembangkit listrik yang memperhatikan Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, serta Pengamanan sesuai dengan kewajiban Terintegrasi yang sudah ditandatangani oleh Manajemen UPK Tambora. Selain itu PLTU Sumbawa juga ikut berpartisipasi

dalam menjaga keharmonisan di lingkungan kerja ring satu yakni dengan adanya pelaksanaan Program Bina Lingkungan. Salah satu wujud program tersebut yakni melalui Program *Community Development* dimana pada saat ini oleh perusahaan, dilihat tidak hanya mempunyai nilai strategis sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang perusahaan terhadap masyarakat setempat, namun bisa dilihat juga sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam menjaga keberlangsungan operasional usaha sehingga tetap mendatangkan profit seperti yang ditargetkan. *Community Development* dalam konteks dunia usaha sendiri sebenarnya dapat dilihat sebagai wujud dari pengejawantahan konsep CSR (Corporate Social Responsibility) yang berfokus kepada stakeholder diluar perusahaan, terutama masyarakat lokal (Surna T. Djajadiningrat, 2005).

Dalam rangka mewujudkan program bina lingkungan khususnya program *community development*, sebagai langkah awal dan menjadi fokus kajian ini yaitu perlu dilakukan pemetaan terhadap kondisi sosial masyarakat yang terdapat di lokasi perusahaan PT PLN beroperasi.

2. TUJUAN

- a. Mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdapat di wilayah Desa Labuhan Lalar Kabupaten Sumbawa Barat
- b. Merumuskan Strategi dan Program PT PLN (Persero) dalam rangka pemberdayaan masyarakat di wilayah Desa Labuhan Lalar Kabupaten Sumbawa Barat

3. KELUARAN

- a. Gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdapat di wilayah Desa Labuhan Lalar Kabupaten Sumbawa Barat
- b. Rumusan Strategi dan Program PT PLN (Persero) dalam rangka pemberdayaan masyarakat di wilayah Desa Labuhan Lalar Kabupaten Sumbawa Barat.

4. MANFAAT

- a. dapat dijadikan bahan data bagi PT PLN (Persero) untuk menentukan sikap dalam mengambil keputusan.

- b. dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk merumuskan tindakan-tindakan strategis dan keputusan yang diambil oleh PT PLN (Persero) berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat .

5. TINJAUAN TEORITIS

5.1. Pemetaan Sosial Ekonomi

Pemetaan sosial adalah satu metode visual yang menunjukkan lokasi relatif suatu komunitas atau kelompok yang dilakukan untuk menemukenali dan mendalami kondisi sosial komunitas tersebut. *Social mapping* adalah teknik untuk membuat gambar kondisi sosial ekonomi masyarakat, misalnya gambar posisi pemukiman, sumber-sumber mata pencaharian, jalan, pelayanan kesehatan dan sarana-sarana umum. Hasil gambaran ini merupakan peta umum sebuah lokasi yang menggambarkan keadaan masyarakat maupun lingkungan fisik, sehingga dapat digunakan untuk menganalisa dan mendalami bersama masyarakat untuk memunculkan topik-topik dan tema-tema tertentu.

Sebagaimana dikutip dalam Wicaksana (2016) terdapat dua pengertian pemetaan yaitu, sebagai metode atau sebagai produk. Sebagai metode, pemetaan mencakup serangkaian cara dan proses untuk menggambarkan kondisi fisik, sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan jaringan relasi masyarakat yang menjadi subyek kajian. Sebagai produk, pemetaan merupakan hasil akhir dari suatu proses pemetaan yang berbentuk gambaran (paparan, uraian) atau peta (gambar atau visual) mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi lingkungan hidup yang menjadi subyek kajian.

Pemahaman dan pemanfaatan pemetaan, baik sebagai metode maupun sebagai produk, memungkinkan siapapun, termasuk peneliti, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, untuk melihat prospek ke depan berkaitan dengan informasi yang terkandung dalam peta atau gambaran ini. Tetapi umumnya yang melakukan pemetaan adalah pihak yang akan mengelola program pengembangan masyarakat.

Informasi pemetaan memungkinkan siapa pun untuk merancang berbagai program dan kegiatan berbasis kebutuhan masyarakat, menjawab masalah yang dihadapi, mengembangkan potensi yang ada dan memberikan solusi bersama.

Misalnya dalam program-program pengembangan masyarakat (*community development*) dan atau relasi masyarakat (*community relation*).

5.2. Pemberdayaan

Mardikanto dan Soebiato (2012) memberikan pengertian pemberdayaan sebagai proses penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas yang dimaksud adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun sistem atau jejaring antar individu dan kelompok/organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di aras global. Upaya pemberdayaan perlu mengikutsertakan semua potensi yang ada pada masyarakat. Dalam hubungan ini, pemerintah daerah harus mengambil peranan lebih besar karena sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakatnya.

Priyono (1996) yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato (2012) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan, yaitu: (1) pengembangan sumberdaya manusia; (2) pengembangan kelembagaan kelompok; (3) pemupukan modal masyarakat (swasta); (4) pengembangan usaha produktif; dan (5) penyediaan informasi tepat-guna.

Menurut Suharto (2010) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki rasa kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Lebih lanjut Sumodiningrat (1999) memilah kebijaksanaan pemberdayaan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat; (2) kebijaksanaan yang secara

langsung mengarah pada kegiatan peningkatan ekonomi produktif kelompok sasaran; dan (3) kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

5.3. Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*)

Pemberdayaan masyarakat secara luas diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pembangunan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) secara konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya menurut istilah *community driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat. Sedangkan memberdayakan adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang mengikuti pentahapan. Pada umumnya tahap yang lebih awal merupakan prasarat bagi tahap berikutnya. Ada tiga tahap penting yang harus dilewati yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Menurut Sumodiningrat (1999) pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu proses meningkatkan kemampuan atau kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang: (1) penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; (2) peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; dan (3) perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Upaya memberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Pada sisi pertama ini, titik tolaknya adalah pengenalan

bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat (Totok dan Poerwoko, 2012).

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi, sekarang telah banyak diterima bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur, meskipun upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Banyak pihak yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan alternatif pemecahan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi.

Pengembangan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat secara aktif dalam proses-proses dan kegiatan masyarakat serta untuk menciptakan kembali masa depan masyarakat dan individu (Ife dan Tesoriero, 2008). Partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan diperlukan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip *good governance*, bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya merupakan tugas pemerintah (*state*), tetapi juga menjadi tanggung jawab swasta (*private*) dan masyarakat madani (*civil society*) seperti yang dikemukakan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menciptakan *good governance* yang memiliki unsur-unsur akuntabilitas, partisipasi, *predictability* dan transparansi. Oleh karena itu, salah satu prinsip *good governance* (kepemerintahan yang baik) yang sering diturunkan menjadi *good local governance* (kepemerintahan daerah yang baik) adalah tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat (Pertiwi, 2003).

Ada empat macam kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Yadav (1980) yang dikutip oleh Totok dan

Poerwoko (2012) yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang-tunai, dan atau beragam bentuk korban lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima.
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Kegiatan ini dilakukan untuk bisa memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang dihadapi dan bukan hanya untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Keempat macam kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dikemukakan Yadav (1980) tersebut diatas, partisipasi masyarakat dalam perencanaan atau pengambilan keputusan pembangunan (termasuk penetapan rencana) adalah merupakan salah satu lingkup atau tahapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jelaslah bahwa partisipasi masyarakat dalam era desentralisasi ini menjadi salah satu keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Slamet (1985) sebagaimana yang dikutip oleh Totok dan Poerwoko (2012) menyatakan bahwa tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu: 1) adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, 2) adanya kemauan

masyarakat untuk berpartisipasi, 3) adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Di samping itu, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai berikut: 1) kebutuhan/kepentingan, 2) sikap, dan 3) manfaat atau *reward* (Totok dan Poerwoko (2012).

Partisipasi masyarakat dapat meningkat atau dapat digerakkan apabila kondisi hidup masyarakat mengalami perbaikan. Ndraha (1990) menjelaskan untuk dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan usaha-usaha:

1. Perbaikan kondisi hidup masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata;
2. Perbaikan kondisi hidup masyarakat dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (*response*) yang dikehendaki;
3. Perbaikan kondisi hidup masyarakat dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki secara berlanjut;
4. Proyek pembangunan desa yang dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat;
5. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.

Dari beberapa konsep tentang syarat atau faktor-faktor tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang timbul dan berangkat dari diri masyarakat atau komunitas itu sendiri yakni kemauan, kemampuan, sikap, dan kebutuhan atau kepentingan. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar masyarakat atau komunitas itu sendiri namun berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat tersebut, yaitu kesempatan, dan manfaat/*reward*.

5.4. Corporate Social Responsibility

Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (*social responsibility*) pada lingkungannya. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial hidup berdasarkan aturan, nilai dan kebutuhan masyarakat. Berbuat baik atau kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dan segi kecerdaan, berbuat kebajikan adalah salah satu unsur kecerdasan spiritual. Sementara dalam konteks perusahaan, tanggung jawab sosial itu disebut tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*--CSR).

Secara etik, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pesaham atau *shareholder*, tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap pihak-pihak lain secara sosial termasuk masyarakat disekitarnya. Karena itu CSR adalah nilai moral yang semestinya dilaksanakan atas panggilan nurani pemilik atau pimpinan perusahaan bagi peningkatan kesejahteraan stakeholder perusahaan. *Stakeholders* adalah seseorang atau kelompok orang yang kena pengaruh langsung atau tidak langsung atau pada kegiatan bisnis perusahaan, atau yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung kegiatan bisnis perusahaan. *Stakeholders* perusahaan meliputi pesaham, pemimpin, pekerja, penyedia barang dan jasa (mitra atau *supplier*), pesaing, konsumen, pemerintahan dan masyarakat.

Peranan perusahaan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat terkait dengan konsep CSR. Seperti yang diungkapkan oleh Yusuf Wibisono (2007) yang berpendapat bahwa CSR merupakan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang menyangkut aspek sosial, ekonomi dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Komitmen tanggung jawab sosial di perusahaan harus memiliki pandangan bahwa CSR merupakan investasi masa depan bagi perusahaan. CSR bukan dilihat sebagai sentral biaya (*cost centre*), melainkan sentral laba (*Profit Centre*) di masa mendatang. Sehingga terjadi hubungan yang harmonis dan citra

yang baik, dan timbal baliknya masyarakat akan ikut menjaga eksistensi perusahaan

Konsep CSR sendiri sebenarnya bukanlah baru sama sekali. Ketentuan mengenai kegiatan CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan bahwa setiap perseroan atau penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pengaturan CSR juga bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya. Dengan demikian CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, bukan kegiatan yang bersifat sukarela menurut Wahyudi dan Azheri, seperti yang dikutip Yintayani (2011).

Sebenarnya definisi CSR sangatlah beragam, bergantung pada visi dan misi korporat yang disesuaikan dengan *needs, desire, wants*, dan *interest* komunitas. Beberapa definisi CSR seperti yang dikemukakan oleh Rahman (2009) diantaranya, Chambers mendefinisikan melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut peraturan undang-undang. Trinidad and Tobacco Bureau of Standards mendefinisikan Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas. *The world Business Council for Sustainable Development* mendefinisikan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Praktik paling terkenal dari CSR adalah *Community Development* (*comdev*), anya tidaklah dapat disamakan. *Comdev* didefinisikan sebagai upaya sistematis meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok-kelompok

paling tidak beruntung, dalam pemenuhan kebutuhan berdasarkan potensi seluruh sumberdaya yang dapat diaksesnya.

Alyson Warhurst seperti yang dikutip Sumardiyono (2007), berpendapat, hubungan CSR dan masyarakat terwujud dalam empat hal utama, yaitu :

1. Kontribusi pada pengembangan masyarakat (*comdev*);
2. Pengikutsertaan (*pemrioritasan*) kesempatan kerja dan usaha;
3. Pembiayaan sesuai kerangka legal; dan
4. Tanggapan atas harapan kelompok kepentingan.
5. kategorian Warhurst memperjelas bahwa *comdev* merupakan salah nen sangat penting CSR

Budimanta dalam Rudito dan Famiola (2013) yang dikutip Irawan (2015) menyebutkan bahwa, *community development* adalah kegiatan pembangunan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. Secara hakekat, *community development* merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah pusat dan daerah terhadap kehidupan komunitas lokal menurut Rudi dalam Rudito dan Famiola (2013) yang dikutip Irawan (2015).

6. METODOLOGI PENELITIAN

6.1. Metode

Metode Kajian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap obyek yang diteliti, baik kejadian masa lalu, sekarang dan masa akan datang, dengan mendasarkan pada instrumen yang telah disusun.

6.2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan observasi lapangan, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*).

6.3. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan kajian ini adalah di Kabupaten Sumbawa Barat meliputi delapan kecamatan dan Desa. Lokasi tersebut terbagi menjadi tiga wilayah kajian. Wilayah kajian I di tingkat kabupaten yakni Kabupaten Sumbawa Barat Wilayah kajian II

dilakukan pada tingkat kecamatan yaitu Kecamatan Taliwang, dan wilayah kajian III di Desa Labuhan Lalar. Secara terperinci wilayah kajian dimaksud digambarkan pada halaman berikut :

Tabel : Fokus kajian berdasarkan pembagian wilayah administratif

Wilayah III	1. Desa Labuhan Lalar	5 Dusun	Dusun Toroh, Dusun Bangsal, Dusun Wara' A, Dusun Wara' B dan Dusun Muhajirin
Wilayah II	Kecamatan Taliwang		
Wilayah III	Kabupaten Sumbawa Barat		

6.4. Responden Kajian

Responden kajian adalah para pemangku kepentingan yang mencakup berbagai unsur masyarakat yang merepresentasikan individu, kelompok, maupun organisasi. Kajian akan mengeksplorasi secara mendalam semua komponen masyarakat, yang memiliki pengaruh maupun yang dipengaruhi dalam kaitannya dengan aktivitas operasional PT PLN. Oleh karena itu responden yang akan diwawancarai mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- Ibu rumah tangga/perempuan
- Petani/Nelayan/Penganyang
- Aparat Pemerintahan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten)
- Lembaga Swadaya Masyarakat
- Organisasi Politik dan DPRD
- Media massa
- Organisasi Pemuda
- Tokoh Masyarakat Adat
- Pegawai Negeri Sipil
- Tokoh Agama
- Tokoh Adat
- Supllier
- Usaha Swasta (pengusaha, pedagang)

6.5. Teknik dan Jumlah Responden

Teknik yang digunakan untuk menentukan responden adalah *snowballing samplig*, yaitu responden dipilih berdasarkan informasi dari responden yang telah diwawancarai dan orang-orang setempat. Jumlah responden ditetapkan

berdasarkan keberadaan masing-masing komponen di setiap wilayah kajian. Kisaran jumlah responden untuk setiap dusun adalah 15 orang, di kecamatan adalah 2 orang, dan di kabupaten 2 orang, sehingga total responden adalah 75 orang dengan sebaran sebagai berikut :

- Wilayah Kajian III (level desa) : 75 orang
- Wilayah Kajian II (kecamatan) : 2 orang
- Wilayah Kajian I (kabupaten) : 3 orang

6.6. Teknik Pemetaan Pemangku Kepentingan

Teknik pemetaan pemangku kepentingan difokuskan pada tiga penilaian yakni (a) tingkat keterpengaruhan pemangku kepentingan; (b) posisi pemangku kepentingan dalam hal resistensi (sikap menerima atau menolak) aktivitas perusahaan dan (c) rencana penjalinan hubungan terhadap pemangku kepentingan.

a. Tingkat Keterpengaruhan Pemangku Kepentingan

Tingkat keterpengaruhan pemangku kepentingan disajikan secara berurutan berdasarkan tingkat ketokohan. Penetapan urutan tingkat ketokohan ditentukan berdasarkan hasil penilaian subjektif peneliti pada saat wawancara mendalam. Penilaian tingkat keterpengaruhan ditentukan berdasarkan indikator mempengaruhi atau dipengaruhi yang dibedakan berdasarkan kriteria kinerja ekonomi, kinerja sosial dan kinerja lingkungan. Teknis penilaian ditentukan berdasarkan tiga pertanyaan kunci yakni :

- 1) Apakah kelompok/individu ini mempengaruhi kinerja ekonomi, sosial, lingkungan perusahaan?
- 2) Apakah kelompok/individu ini dipengaruhi oleh kinerja ekonomi, sosial, lingkungan perusahaan?
- 3) Apakah kelompok/individu ini sangat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kinerja ekonomi, sosial, lingkungan perusahaan di masa yang akan datang?

Dari pertanyaan tersebut masing-masing jawaban diberikan bobot angka, jika “ya = 1”, jika “tidak” = 0”. Dengan penilaian tersebut nilai minimum-maksimum pada masing-masing pemangku kepentingan antara 0 – 7. Untuk memperoleh nilai 0-7, masing-masing pemangku kepentingan dipetakan berdasarkan tiga

pertanyaan kunci di atas, kemudian dimasukkan dalam matrik tingkat keterpengaruhan. Model matrik dimaksud disajikan sebagai berikut :

Nama Pemangku kepentingan	Mempengaruhi			Dipengaruhi			Pengaruh/ Dipengaruhi di masa depan	Total
	Kinerja Ekonomi	Kinerja Sosial	Kinerja Lingkungan	Kinerja Ekonomi	Kinerja Sosial	Kinerja Lingkungan		
Responden 1								
Responden 2								
Responden 3								
..... dst								

b. Posisi Pemangku Kepentingan dalam Mendukung atau Menolak Tambang

Penentuan posisi pemangku kepentingan dilihat berdasarkan beberapa informasi penting terkait dengan kapasitas, wilayah pengaruh (desa/kecamatan/kabupaten/provinsi dan nasional), wilayah konsentrasi (ekonomi/sosial/lingkungan), kategori keterpengaruhan (dipengaruhi atau memengaruhi), tingkat keterpengaruhan dan tingkat dukungan atau penolakan.

Penilaian tingkat dukungan atau penolakan pemangku kepentingan dibedakan menjadi tiga kategori yakni **mendukung, netral dan menolak**. Selanjutnya tingkat dukungan atau penolakan disajikan dalam bentuk angka (nilai). Kategori mendukung dibedakan menjadi empat kategori yakni rendah positif, menengah positif, tinggi positif dan ekstrim positif. Kategori menolak juga dibedakan menjadi empat kategori yakni rendah negatif, menengah negatif, tinggi negatif dan ekstrim negatif.

Masing-masing kategori tersebut kemudian diberikan nilai berdasarkan tingkatan sebagai berikut :

Mendukung (positif)		Netral	Menolak (negatif)	
Tingkatan	Nilai		Tingkatan	Nilai
Rendah positif,	1	0	Rendah negatif	-1
Menengah positif	2		Menengah negatif	-2
Tinggi positif	3		Tinggi negatif	-3
Ekstrim positif	4		Ekstrim negatif	-4

Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai posisi pemangku kepentingan yakni nilai tingkat keterpengaruhan dikalikan dengan nilai tingkat dukungan atau penolakan. Sejumlah informasi penting termasuk posisi pemangku kepentingan dan hasil perhitungan tingkat posisi tersebut kemudian disusun dalam matrik pemetaan. Model matrik dimaksud sebagai berikut:

Name of Pemangku kepentingan (and alias)	Capacity (Individual/ NGO/ Government)	Area of Influence (Village/Subdistrict/District/Provincial/National)	Area of Concern (Economic/ Social/ Environment)	Impact Category (Bring Impact/Be Impacted)	Level of Impact (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	Level of Support/ Resistance (-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4)	Position
Responden 1							
Responden 2							
Responden 3							
..... dst							

Penilaian tingkat keterpengaruhan yakni 1 – 7, dan dibagi menjadi tiga kategori yakni tingkat keterpengaruhan rendah nilainya 1 - 2, tingkat keterpengaruhan menengah nilainya 3 – 5 dan tingkat keterpengaruhan tinggi nilainya 6 – 7. Penentuan tingkat keterpengaruhan pemangku kepentingan ditentukan berdasarkan subjektivitas peneliti. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai minimum dan maksimum yakni mendukung (positif) 1 - 28, menolak (negatif) 1 – 28 dan netral 0,1 – 0,7. Hasil penilaian tersebut, kemudian disusun dalam matrik pemetaan sebagai berikut :

Tingkat Dukungan/Penolakan Terhadap Keberadaan dan Kegiatan Perusahaan											
Tingkat Kepentingan	Nilai	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	Tingkat
	7	-28	-21	-14	-7	0.7	7	14	21	28	Tinggi
	6	-24	-18	-12	-6	0.6	6	12	18	24	
	5	-20	-15	-10	-5	0.5	5	10	15	20	Menengah
	4	-16	-12	-8	-4	0.4	4	8	12	16	
	3	-12	-9	-6	-3	0.3	3	6	9	12	
	2	-8	-6	-4	-2	0.2	2	4	6	8	Rendah
	1	-4	-3	-2	-1	0.1	1	2	3	4	
		Ekstrim Negatif	Tinggi Negatif	Menengah Negatif	Rendah Negatif	Netral	Rendah Positif	Menengah Positif	Tinggi Positif	Ekstrim Positif	

c. Rencana Penjalinan Hubungan terhadap Pemangku Kepentingan

Rencana penjalinan hubungan terhadap pemangku kepentingan ditentukan berdasarkan lima kategori yakni posisi sekarang, rencana posisi, strategi pendekatan, tahun mulai pendekatan dan tahun berakhirnya pendekatan. Kategori penilaian tersebut kemudian disusun dalam logframe sebagai berikut :

No.	Name of Pemangku kepentingan (and Alias)	Current Position	Expected Position	Strategy (a set of actions to describe the approach)	Start Date (d/m/y)	End Date (d/m/y)
1	Responden 1					
2	Responden 2					
3	Responden 3					
10 dst					

7. BENTUK DAN TAHAPAN KEGIATAN

a. Konsolidasi Tim dan Penyiapan Instrumen Kegiatan

Konsolidasi tim dimaksudkan untuk memastikan siapa saja tim dengan melakukan perekrutan sumber daya peneliti, mendeskripsikan dengan jelas peran, tugas, hak dan tanggungjawab masing-masing anggota tim, pembagian lokasi kajian, dan penyepakatan waktu/jadwal kegiatan. Tim Kajian terdiri atas 1 orang tim leader, 2 orang tenaga ahli, dan 3 orang tim pendukung. Tim inti, yaitu terdiri team leader, tenaga ahli, akan menyiapkan instrumen kajian meliputi : kerangka acuan kegiatan, pedoman pengumpulan data, format tabulasi data, sistematika laporan, dan format pendukung lainnya.

b. Pembekalan Tim Kajian

Sebagai upaya untuk menyamakan persepsi dan penguatan kapasitas tim, akan dilaksanakan kegiatan pembekalan bagi seluruh tim kajian. Hal ini sangat penting mengingat individu tim berasal dari berbagai disiplin ilmu, pengalaman yang beragam, serta wilayah kajian yang akan dihadapi adalah tergolong unik dan beresiko. Pembekalan akan menyampaikan materi antara lain : pengenalan prinsip penelitian kualitatif, teknik pemetaan dan analisa para pemangku kepentingan, pendekatan sosial, dan analisa hubungan para pihak. Hal teknis mengenai rancangan pembekalan akan dituangkan ke dalam kerangka acuan.

c. Observasi lapangan

Observasi lapangan adalah kegiatan untuk pengenalan medan atau lokasi kajian, mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang akan diwawancarai, urutan langkah kegiatan yang akan ditempuh, tempat penginapan peneliti, dan identifikasi partner lokal untuk pendamping peneliti.

d. Wawancara mendalam dan FGD

Wawancara dilakukan melalui tatap muka dengan responden, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci berpedoman pada panduan dan format yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan terhadap responden yang merepresentasikan individu maupun mewakili lembaga tertentu. FGD dilakukan untuk penggalian data pada level kecamatan dan dilakkan sekali untuk setiap kecamatan, dengan menghadirkan informan kunci yang mewakili masing-masing desa.

e. Pleno Hasil Pengumpulan data dan Pembekalan tim

Hasil pengumpulan data akan diplenokan hasilnya melalui pertemuan dengan seluruh tim peneliti. Pleno akan mereview mengenai kelengkapan data yang diperoleh, temuan-temuan penting, dan permasalahan yang ditemui selama melakukan kajian. Data yang dinilai belum cukup akan segera dicarikan solusi pemecahannya. Pleno juga akan memberikan pembekalan tim mengenai formulasi tabulasi data dan penyusunan laporan.

f. Tabulasi data dan analisis data

Tabulasi dan analisis data dilakukan oleh Tim peneliti dengan berpedoman pada format yang telah ditentukan pada kegiatan pleno hasil kajian.

g. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan menggunakan sistematika sesuai dengan panduan yang telah ditentukan. Penyusunan Laporan dilakukan oleh peneliti dengan supervisi oleh tenaga leader.

h. Desimenasi Hasil Kajian

Hasil laporan dalam bentuk draft laporan menjadi bahan untuk diseminasi hasil kajian kepada pihak PT PLN dan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat. Diseminasi selain dimaksudkan untuk publikasi hasil kajian kepada para pihak, juga untuk menerima masukan yang konstruktif dalam rangka memperkaya gagasan strategis untuk rumusan-rumusan ke depan dan sekaligus penyempurnaan laporan.

j. Penyempurnaan Laporan Akhir dan Penggandaan

Penyempurnaan laporan akhir dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak (PT PLN dan unsur lain), baik yang berkaitan dengan substansi, isi dan redaksi dan layout laporan.

8. JADWAL KEGIATAN

Periode waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan evaluasi mulai dari persiapan sampai laporan adalah 4 bulan, dengan urutan kegiatan dan waktu sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Bulan/Minggu															
		Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan Dokumen dan Persiapan Tim Peneliti																
2.	Pengumpulan Data (Observasi, wawancara dan FGD)																
3.	Diskusi Hasil Penelitian																
4.	Tabulasi, Pengolahan dan Analisis Data																
5.	Penyusunan Laporan Awal																
6.	Deseminasi Hasil Penelitian																
7.	Penyempurnaan Laporan dan Penggandaan																

Lampiran 1. Biaya Penelitian Kajian Pemetaan Sosial

9. BIAYA PENELITIAN

No	Komponen Biaya	Biaya Langsung			Biaya Non Langsung			Total (Rp)
		Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Subtotal (Rp)	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Subtotal (Rp)	
1.	Tim Peneliti							
	Ketua (1 Org x 4 bln)	OB	4.000.000	16.000.000				16.000.000
	Anggota (2 Org x 4 bln)	OB	3.000.000	24.000.000				24.000.000
2.	Tenaga Pendukung			-				-
	Tenaga Administrasi (1 Org x 4 bln)	OB	1.500.000	6.000.000				6.000.000
	Tenaga Komputer (1 Org x 4 bln)	OB	1.500.000	6.000.000				6.000.000
	Tenaga Survey (1 Org x 4 bln)	OB	1.500.000	6.000.000				6.000.000
3.	Biaya Pengambilan Data							
	Akomodasi 6 x 14 (Org x Hari)				84	OH	150.000	12.600.000
	Konsumsi 6 x 3 x 14 (Org x Kali x Hari)				252	OH	20.000	5.040.000
	Sewa Kendaraan Roda 4				14	Hari	500.000	7.000.000
4.	Biaya FGD						-	-

	Akomodasi 6 x 1 (Org x Hari)				6	OH	150.000	900.000	900.000
	Konsumsi 30 x 3 x 1 (Org x Kali x Hari)				90	OH	50.000	4.500.000	4.500.000
	Sewa Gedung (1 Hari)				1	Hari	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Sewa Kendaraan Roda 4				1	Hari	500.000	500.000	500.000
4.	Bahan Pakai Habis							-	-
	Tinta Printer				4	Buah	150.000	600.000	600.000
	Kertas HVS				6	Rim	60.000	360.000	360.000
	Fotocopy Kuesioner				2000	Lembar	200	400.000	400.000
	Dokumentasi				20	Lembar	5.000	100.000	100.000
5.	Penggandaan Laporan Awal				10	Eksemplar	150.000	1.500.000	1.500.000
6.	Seminar Laporan Akhir				20	Eksemplar	200.000	4.000.000	4.000.000
7.	Penggandaan Laporan Akhir				10	Eksemplar	150.000	1.500.000	1.500.000
Total Biaya Keseluruhan									100.000.000

10. ORGANISASI PELAKSANA

Tenaga Ahli : 3 orang

- Muhammad Nursan, SP., M.Si (Agribisnis dan Ekonomi Pertanian)
- Jalaluddin, S.El., MP (Ekonomi Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat)
- Anton, SP., MP (Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat)

Tim Pendukung : 3 orang

- Sumarlin, S.El., MP
- Sri Wahyuni, S.Si
- Burhanuddin, S.Pd